

**INKONSISTENSI POLANDIA DALAM MERESPONS
KRISIS PENGUNGSI DI EROPA**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk Memenuhi
Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos) dalam Bidang
Hubungan Internasional**



**Oleh:
BRIAN RIZKY BIMANTARA
NIM. I92214016**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
JULI 2018**

**PERNYATAAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI**

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Brian Rizky Bimantara
NIM : I92214016
Program Studi : Hubungan Internasional
Judul Skripsi : *Inkonsistensi Polandia dalam Merespons Krisis Pengungsi di Eropa*

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- 1) Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan mana pun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
- 2) Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
- 3) Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 12 Juli 2018

Yang menyatakan



Brian Rizky Bimantara

NIM: I92214016

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Brian Rizky Bimantara
NIM : I92214016
Program Studi : Hubungan Internasional

yang berjudul: **“Inkonsistensi Polandia dalam Merespons Krisis Pengungsi di Eropa”**, saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial dalam bidang Hubungan Internasional.

Surabaya, 12 Juli 2018

Pembimbing



M. Fathoni Hakim, M.Si

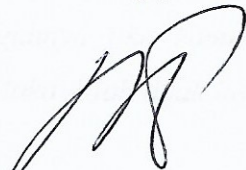
NIP: 198401052011011008

PENGESAHAN

Skripsi oleh Brian Rizky Bimantara dengan judul: **“Inkonsistensi Polandia dalam Merespons Krisis Pengungsi di Eropa”** telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 24 Juli 2018.


TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I




M. Fathoni Hakim, M.Si
NIP. 198401052011011008

Penguji II




Muhammad Qobidl 'Ainul Arif, S.IP., MA.
NIP. 198408232015031002

Penguji III



Zaky Ismail, M.S.I
NIP. 198212302011011007

Penguji IV



Abid Rohman, S.Ag, M.Pd.I
NIP. 197706232007101006

Surabaya, 24 Juli 2018

Mengesahkan,
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan



Prof. Aka Muzaki, M.Ag, Grad. Dip. SEA, M.Phil, Ph.D.
NIP. 197402091998031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Brian Rizky Bimantara
NIM : I92214016
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/ Hubungan Internasional
E-mail address : bryan.uinsa@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Inkonsistensi Polandia dalam Merespons Krisis Pengungsi di Eropa

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Agustus 2018

Penulis,

(Brian Rizky Bimantara)

ABSTRAK

Brian Rizky Bimantara, 2018, *Inkonsistensi Polandia dalam Merespons Krisis Pengungsi di Eropa*, Skripsi Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya.

Kata Kunci: *Polandia, European Refugee Crisis, Europeanization, Pengungsi*

Penelitian ini berusaha menjelaskan alasan inkonsistensi Polandia dalam mengimplementasikan *European Refugee Relocation Plan* sebagai respons terhadap krisis pengungsi di Eropa. Metode yang digunakan ialah kualitatif dengan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Berdasarkan teori konstruktivisme, inkonsistensi yang dilakukan oleh Polandia didasari oleh identitas yang dimilikinya yakni: 1) Polandia sebagai pelindung Eropa dan Kristen; 2) Polandia adalah negara yang homogen baik etnis dan agama; 3) Norma dan nilai Polandia tidak sepenuhnya sama dengan yang dianut oleh Uni Eropa. Peneliti kemudian berusaha menjelaskan proses sekuritisasi isu pengungsi tersebut dengan teori sekuritisasi yang menunjukkan bahwa elit politik Polandia berusaha membenturkan identitas pengungsi dengan masyarakat Polandia guna menunjukkan bahwa pengungsi tersebut adalah ancaman yang harus dihindari. Dengan konsep Eropanisasi, peneliti kemudian melengkapi alasan inkonsistensi Polandia dari sisi integrasi politik Uni Eropa yakni ketiadaan *facilitating factor* di Polandia yang menyebabkan tidak terimplementasinya *European Refugee Relocation Plan* sebagai respons terhadap krisis pengungsi di Eropa.

ABSTRACT

Brian Rizky Bimantara, 2018, *Poland's Inconsistency in Responding European Refugee Crisis*, Undergraduate Thesis Department of International Relations Faculty of Social and Political Sciences State Islamic University of Sunan Ampel Surabaya.

Keywords: *Poland, European Refugee Crisis, Europeanization, Refugees*

This research seeks to explain the reasons for Poland's inconsistency in implementing the European Refugee Relocation Plan in response to the European refugee crisis. The method used is qualitative with documentation as a data collection technique. Based on the theory of constructivism, the inconsistency committed by Poland is based on its own identity such as: 1) Poland as a protector of Europe and Christianity; 2) Poland is a homogeneous country both ethnic and religious; 3) Polish norms and values are not entirely the same as those adopted by the European Union. The researcher then attempted to explain the process of securitization of the refugee issue with the theory of securitization which showed that the Polish political elite was attempting to clash refugee identity with Polish society to show that the refugees were a threat that need to be avoided. With the concept of Europeanization, the researcher then complement the reason for the Poland's inconsistency in terms of EU political integration namely the absence of a facilitating factor in Poland that causes the European Refugee Relocation Plan is not implemented in response to the European refugee crisis.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN PERTANGGUNG JAWABAN PENULISAN SKRIPSI....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR BAGAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Kerangka Konseptual.....	13
1. Pengungsi.....	13
2. Orang Tak Berkewarganegaraan.....	14
3. Pencari Suaka.....	14
4. <i>European Union</i>	15
5. Krisis Pengungsi di Eropa.....	16
6. <i>European Refugee Relocation Plan</i>	17
G. Hipotesa	18
H. Sistematika Penyajian Skripsi.....	19
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	21
A. Teori Konstruktivisme	22
B. <i>Copenhagen School</i> dan <i>Securitization Theory</i>	27
C. Eropanisasi (<i>Europeanization</i>).....	29
1. Dampak Eropanisasi terhadap Kondisi Domestik Negara Anggota	30
2. <i>Facilitating Factors</i> sebagai Pendorong Perubahan Domestik	35

Berdasarkan *UN Refugee Agency*, perang sipil di Suriah sendiri yang telah terjadi pada tahun 2011 telah menyebabkan kurang lebih lima juta penduduknya menjadi pengungsi.³ Hal ini menjadikan Suriah sebagai populasi pengungsi terbesar dari konflik tunggal sepanjang sejarah. Selain Suriah, penduduk Eritrea menjadi pengungsi yang paling banyak melarikan diri ke Eropa melalui jalur yang tidak biasa (*irregular route*). Lemahnya penegakan hak asasi manusia serta kekerasan yang terjadi di bawah otoritas pemerintah menyebabkan adanya potensi *crimes against humanity* di Eritrea sehingga penduduknya berusaha untuk melarikan diri ke Eropa.⁴

Kebanyakan para pengungsi memilih untuk melarikan diri ke Eropa karena ekonomi negara-negara Eropa yang relatif stabil membuat Eropa sebagai destinasi dengan peminat pengungsi lebih tinggi daripada kawasan yang lain. Sedangkan gelombang pengungsi yang terlampau tinggi, sekitar satu juta pengungsi baru, cukup membuat beberapa negara anggota Uni Eropa kewalahan diantaranya Italia dan Yunani yang

⁴ “European Refugee Crisis 2015: Why So Many People Are Fleeing The Middle East and North Africa,” diakses 09 April 2018, <http://www.ibtimes.com/european-refugee-crisis-2015-why-so-many-people-are-fleeing-middle-east-north-africa-2081454>.

Karena jika mengacu pada *Dublin Regulation* maka pencari suaka harus tetap tinggal di negara Eropa yang pertama kali mereka kunjungi dan negara tersebut yang bertanggung jawab untuk mengurus aplikasi suaka dari para pengungsi yang datang. Sedangkan migran yang berusaha pergi ke negara Eropa lain dapat dipastikan akan dideportasi kembali ke negara Eropa yang pertama kali mereka datangi. Oleh karena itu, jika tetap menggunakan *Dublin Regulation* dalam menghadapi gelombang pengungsi yang cukup besar maka beban tanggung jawab tidak akan terbagi secara merata.

[illegible]

Untuk membagi beban keuangan, telah diputuskan bahwa negara anggota akan menerima 6000 Euro untuk setiap individu yang direlokasi ke negaranya. Disaat yang bersamaan, Italia dan Yunani juga akan mendapatkan 500 Euro sebagai uang transportasi pengungsi dari Italia dan Yunani ke negara relokasi. Akan tetapi Polandia yang pada awalnya setuju terhadap rencana relokasi tersebut hingga pada tahun 2017 masih belum

⁶ Ibid.

Oleh karena itu, penulis menganggap hal ini menarik karena ketika Polandia, sebagai negara anggota Uni Eropa, yang pada tahun 2015 berkomitmen secara hukum untuk menerima 6.182 pengungsi, terbesar keempat setelah Jerman, Perancis, dan Spanyol, tetapi hingga tahun 2017 belum sama sekali menerima pengungsi untuk dipindahkan di Polandia. Hal ini juga menjadi menarik bagi penulis ketika berujung pada penuntutan Polandia di ECJ (*The European Court of Justice*) pada tahun 2017. Sehingga penulis menganggap signifikan untuk meneliti relasi identitas Eropa dalam mengkonstruksi Polandia untuk patuh pada peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Uni Eropa khususnya pada isu pengungsi sesuai dengan nilai-nilai Uni Eropa yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan non-diskriminasi.⁸

keempat setelah Jerman, Perancis, dan Spanyol, tetapi ini belum sama sekali menerima pengungsi untuk dipindahkan. Hal ini juga menjadi menarik bagi penulis ketika penuntutan Polandia di ECJ (*The European Court of Justice*) 2017. Sehingga penulis menganggap signifikan untuk identitas Eropa dalam mengkonstruksi Polandia untuk peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Uni Eropa khususnya pengungsi sesuai dengan nilai-nilai Uni Eropa yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan non-diskriminasi.⁸

⁸ “The EU in brief,” diakses 04 April 2018, https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_en

Berdasarkan latar belakang di atas, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah:

Penelitian ini bertujuan untuk:

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

- Hasil penelitian dapat digunakan sebagai sarana diagnosis dalam mencari penyebab *European refugee relocation plan* tidak diimplementasikan dengan baik oleh Polandia sehingga dapat digunakan untuk rujukan pertimbangan dalam pembuatan strategi atau kebijakan selanjutnya.

¹⁰ EU to sue Poland, Hungary and Czechs for refusing refugee quotas,” diakses 04 April 2018, <http://www.bbc.com/news/world-europe-42270239>.

2. Bagi akademisi

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai rujukan bahan pertimbangan untuk menambah wawasan terutama bagi yang berminat meneliti topik terkait identitas Eropa.

3. Bagi peneliti

Sebagai langkah konkrit penerapan ilmu berdasarkan teori yang selama ini didapat peneliti selama menempuh pendidikan sarjana.

E. Tinjauan Pustaka

Peran identitas dalam suatu objek menjadi sangat penting ketika dapat mempengaruhi objek lain secara signifikan, baik karakteristik maupun kinerjanya. Tak terkecuali pada lingkup dunia internasional, dimana identitas yang dimiliki oleh suatu organisasi regional menjadi sangat penting dalam mempengaruhi negara-negara anggotanya. Identitas organisasi regional menjadi salah satu faktor yang sangat memberikan implikasi negara anggotanya dalam melakukan sesuatu ataupun mengeluarkan kebijakan yang telah dipadu-padankan dengan orientasi organisasi tersebut sehingga organisasi tersebut secara tidak langsung akan dapat mengimplementasikan visi-misinya melalui negara anggota. Tidak hanya dari segi organisasi saja, negara anggota pun juga turut merealisasikan visi-misi organisasi yang telah masuk dalam identitas itu dan mengadopsinya untuk diterapkan di dalam negeri. Hal inilah yang mengakibatkan beberapa perubahan yang dihasilkan dari negara-negara dimana sebelumnya tidak bergabung pada salah satu organisasi regional.

Kategori pertama mengatakan bahwa dalam merespons kebijakan yang dikeluarkan oleh organisasi regional, negara anggota dalam mengeluarkan kebijakannya dipengaruhi oleh psikologi pemimpin dan politik domestik negara tersebut.¹² Kategori kedua mengatakan bahwa Uni Eropa memiliki agensi khusus guna mengatur menangani masalah perbatasan negara terkait krisis pengungsi di Eropa.¹³ Kategori ketiga mengatakan bahwa terdapat aksi dan reaksi antara organisasi regional dan negara anggota yang dapat dilihat melalui wacana yang dilontarkan oleh otoritas baik organisasi regional maupun negara anggota dalam menyekuritisasi maupun mendesekuritisasi isu.¹⁴ Kategori keempat mengungkapkan bahwa selalu terdapat respon yang beragam dari negara anggota terhadap organisasi supranasional. Keragaman respon tersebut diakibatkan karena partisipasi rakyat yang aktif terhadap transfer kebijakan yang ditetapkan oleh Uni Eropa terhadap negara anggotanya.

Pada kategori pertama, penelitian yang ditulis oleh Muzalevskaya menjelaskan perbedaan respons yang diambil oleh Angela Merkel dan Francois Hollande dalam menghadapi krisis pengungsi Eropa. Penelitian

¹³ Alexandra Pommer, "Frontex's Sea Operations: between Security and Human Rights" (Skripsi, University of Twente dan University of Munster, 2015)

¹⁴ Laura Martines Carreno, “The Securitization of Migration in the European Union during 2015 An analysis of the discourse in Germany, Hungary, and the Czech Republic” (Thesis Master, Charles University in Prague, 2016)

Pada kategori kedua, penelitian yang ditulis oleh Pommer menjelaskan bahwa sebuah organisasi regional, dalam hal ini adalah Uni Eropa, memiliki agensi khusus guna mengatur menangani masalah keamanan Bersama. Masalah tersebut lebih banyak terjadi di perbatasan

[illegible]

Pada kategori ketiga, penelitian yang ditulis oleh Carreno menjelaskan bahwa respons negara anggota Uni Eropa, dalam hal ini adalah Jerman, Hungaria, dan Republik Ceko, berbeda terhadap kebijakan Uni Eropa mengenai krisis pengungsi di Eropa. Respons yang berbeda tersebut dapat dilihat melalui wacana (*discourse*) yang diungkapkan oleh otoritas dari masing-masing negara. Dalam hal ini Jerman tampak menjadikan krisis pengungsi di Eropa adalah masalah yang harus diselesaikan secara bersama-sama. Hal tersebut terlihat dari bagaimana keterlibatan aktif Angela Merkel dalam membawa isu ini ke Uni Eropa dan publik Eropa secara luas berdasarkan nilai solidaritas Eropa sedangkan Hungaria dan Republik Ceko terlihat enggan untuk menjadikan krisis ini sebagai masalah yang harus ditangani bersama oleh negara anggota Uni Eropa karena isu tersebut adalah sebuah ancaman yang dapat memberikan pengaruh negatif di negaranya. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana otoritas kedua negara tersebut menggambarkan migrasi adalah

[illegible]

Pada kategori keempat, yang ditulis oleh Jose Angel Risco Oliva, menjelaskan bahwa negara Uni Eropa dalam hal ini Spanyol memiliki respon yang beragam terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Uni Eropa. Wacana yang muncul ke permukaan publik terhadap kebijakan Uni Eropa tersebut membutuhkan transformasi dalam perkembangan hubungan antara pemerintah negara Spanyol dengan masyarakatnya guna mengimplementasi kebijakan yang ditetapkan Uni Eropa serta merepresentasikan kepentingan semua negara anggota Uni Eropa. Hal tersebut ditunjukkan pada munculnya *Conferencial Sectoriales* yang merupakan badan kerjasama multilateral yang beroperasi secara spesifik dalam sektor aktivitas publik.¹⁸ *Conferencial Sectoriales* terdiri dari beberapa kementerian yang bertanggung jawab terhadap subyek yang sama. Hal ini menguatkan argumen bahwa negara anggota akan menyesuaikan kebijakan dalam negeri nya akibat adanya proses

¹⁸ Jose Angel Risco Oliva, "Regional Powers and Europeanization process in Spain," *asociace pro mezinarodni otazky* (2006): 20, <https://www.amo.cz/wp-content/uploads/2015/11/amocz-RP-2006-11.pdf>

1. Pengungsi

Pengungsi adalah seseorang yang dalam keadaan terpaksa untuk melarikan diri dari negaranya karena persekusi, penganiayaan, perang, atau kekerasan. Seorang pengungsi memiliki ketakutan atas persekusi dengan alasan ras, agama, kebangsaan, politik atau keanggotaan sebuah kelompok sosial. Kebanyakan dari mereka tidak dapat kembali pulang ke negara asalnya bahkan takut untuk kembali ke rumahnya. Kekerasan perang dan etnis, suku, dan agama adalah penyebab utama pengungsi melarikan diri dari negara mereka. Hampir dari sebagian

[illegible]

pengungsi di dunia berasal dari tiga negara, antara lain: 1) Syria; 2) Afghanistan; dan 3) Sudan Selatan.²⁰

4. *European Union*

Terdapat 28 negara anggota Uni Eropa diantaranya adalah Austria, Belgium, Bulgaria, Kroasia, Cyprus, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Perancis, Jerman, Yunani, Hungaria, Irlandia, Itali, Latvia, Lituania, Luxemburg, Malta, Belanda, Polandia, Portugal, Rumania, Slowakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, dan *the United Kingdom*.²⁴

²³ "What is a Refugee?," diakses 04 April 2018, <https://www.unrefugees.org/refugee-facts/what-is-a-refugee/>

[illegible]

The European Parliament membahas dan menyetujui hukum yang diajukan oleh *the EU Council*. Anggotanya dipilih setiap lima tahun sekali.

5. Krisis Pengungsi di Eropa

Sejak April 2015, Uni Eropa telah berusaha untuk mengatasi krisis tersebut dengan meningkatkan alokasi dana untuk

²⁶ "Migrant crisis: Migration to Europe explained in seven charts," diakses 04 April 2018, <http://www.bbc.com/news/world-europe-34131911>.

6. *European Refugee Relocation Plan*²⁷

Hal tersebut dilakukan oleh EC karena negara anggota Uni Eropa yang berada di perbatasan terdepan dengan Laut Mediterania tidak mampu lagi menanggung lonjakan drastis jumlah pengungsi yang akan masuk ke Benua Eropa.

[illegible]

Jumlah pengungsi yang harus diambil oleh negara anggota Uni Eropa yang lain berdasarkan kalkulasi yang obyektif disertai dengan kriteria yang terhitung dan terverifikasi seperti jumlah populasi, total GDP, rata-rata aplikasi suaka selama empat tahun sebelumnya, serta tingkat pengangguran.

Setiap negara anggota akan menunjuk *Liaison Officers* untuk mencocokkan negara tujuan dengan kualifikasi yang dimiliki oleh pengungsi seperti pengetahuan bahasa, keluarga, budaya, dan sosial, untuk membantu terjadinya integrasi.

Inkonsistensi Polandia dalam merespons krisis pengungsi, dalam hal ini implementasi *European refugee relocation plan* disebabkan oleh perbedaan identitas Polandia. Hal itu dapat lebih terlihat jelas apabila kita

H. Sistematika Penyajian Skripsi

[illegible]

dianggap sebagai ancaman oleh Polandia baik dari pemerintah atau masyarakat yang mengakibatkan Polandia inkonsisten terhadap isu tersebut. Terakhir, penulis akan menggunakan *human security* sebagai pendekatan untuk menjelaskan bagaimana aspek keamanan manusia menjadi salah satu agenda prioritas dalam identitas Eropa.

Bab III menjelaskan metode penelitian yang digunakan oleh penulis

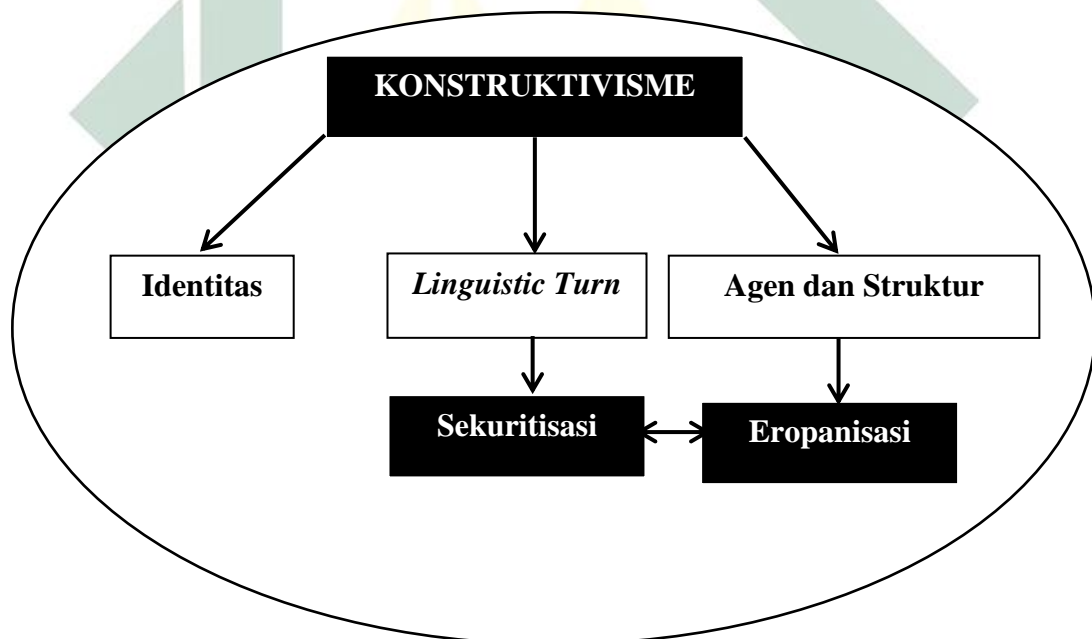
Bab IV berisi sajian data berupa konstruksi identitas Polandia, akses Polandia oleh Uni Eropa, dinamika kebijakan Polandia terhadap krisis pengungsi di Eropa termasuk penggambaran proses sekuritisasi yang dilakukan oleh elit politik Polandia. Dalam bab ini juga akan dipaparkan analisis data menggunakan kerangka teoritik yang telah dijelaskan di Bab II.

BAB V berisi kesimpulan penelitian dengan menegaskan kembali temuan-temuan penting penelitian. Dalam bab ini juga dikemukakan area-area penting untuk penelitian selanjutnya.

LANDASAN TEORITIS

Guna mendapatkan jawaban komprehensif atas rumusan masalah yang dikeluarkan. Peneliti menggunakan tiga landasan teoritis yang digunakan untuk menganalisis data yang peneliti dapatkan. Tiga landasan teori tersebut diantaranya adalah teori konstruktivisme, teori sekuritisasi, konsep Eropanisasi. Berikut bagan operasionalisasi ketiga landasan teori tersebut.

Bagan 2.1
Operasionalisasi landasan teoritik



Teori konstruktivisme sebagai teori induk digunakan untuk menganalisis alasan inkonsistensi Polandia melalui aspek ideasional termasuk identitas didalamnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Onuf bahwa pemikiran konstruktivis dipengaruhi oleh ‘*The Linguistic Turn*’ maka peneliti menggunakan teori sekuritisasi sebagai teori kedua untuk melihat proses elit politik Polandia

A. Teori Konstruktivisme

Konstruktivisme dalam penekanannya terhadap norma-norma, agen sosial, dan identitas membawa konstruktivisme berada diantara post-strukturalis dan post modernis. Keambiguan yang ada tersebut membawa konstruktivisme menjadi sebuah pendekatan yang menggunakan jalan tengah (*middle ground*) dalam studi HI.

Sebagaimana Nicholas Onuf menjelaskan bahwa konstruktivisme merupakan sebuah cara dalam menganalisis fenomena HI yang tidak

²⁹ Cecep Zakarias El Bilad. *Konstruktivisme Hubungan Internasional: Meretas Jalan Damai Perdebatan Antarparadigma* (2011), 66-81.

Dalam pembahasan konstruksi sosial, konstruktivisme membantah argumen Realis dan Neo-Realisme yang memandang bahwa konflik dan perdamaian merupakan suatu hasil yang tetap, tunggal, dan universal dalam ruang dan waktu. Sedangkan Konstruktivisme merupakan sebuah konstruksi sosial yang mana di produksi oleh manusia dan dipengaruhi oleh kepentingan, norma, identitas, dan alat komunikasi sehingga menjadikannya sesuatu yang *flexible*, bergantung pada situasi, kondisi, dan konteks tertentu. Seperti contoh, ketika kita dihadapkan pada realita bahwa di masa perang dingin, konflik dan peperangan lebih diartikan sebagai langkah dalam menjamin keberlangsungan hidup dengan penyebarluasan pengaruh. Namun berbeda ketika pasca perang dingin, konflik dan peperangan lebih diartikan sebagai sebuah bencana bagi dunia yang merusak tatanan sosial.

³⁰ Bob Sugeng Hadiwinata, *Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, alternatif, n reflektivis* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), 266.

Lebih lanjut Rawi Abdelal menyatakan bahwa identitas kolektif tersebut dibentuk karena adanya *content* dan kontestasi. *Content* tersebut berisi arti dari sebuah identitas tersebut, hal tersebut dapat berupa norma-norma dan tujuan sosial yang mendefinisikan dan ditemukan diantara kelompok masyarakat. Norma dan tujuan sosial tersebutlah yang kemudian melekat pada suatu kelompok masyarakat yang menjadikannya berbeda dengan kelompok lain. Sedangkan yang dimaksud kontestasi

³² Anne Clunan, *The Social Construction of Russia's Resurgence* (Baltimore: The John Hopkins University Press), 3.

Konstruktivisme dipilih oleh peneliti karena pendekatan ini juga melihat komunikasi simbolik atau bahasa sebagai konsideran dalam pembahasan fenomena politik internasional. Sebagaimana dijelaskan oleh Hadiwinata bahwa komunikasi simbolik adalah “bahan mentah” yang mengandung kepentingan, intensi, dan identitas yang mengandung otentisitas dan originalitas tinggi yang dapat ditelusuri dari pernyataan para agen (*speech acts*).⁴⁰

³⁷ Alexander Wendt. 1995. *Constructing International Politics*. The MIT Press, 71-81.

³⁹ Price dan Reus dalam Cecep Zakarias El Bilad. *Konstruktivisme Hubungan Internasional: Peretas Jalan Damai Perdebatan Antarparadigma* (2011), 66-81.

[illegible]

Sebagaimana telah dibahas di sub-bab sebelumnya bahwa pemikiran konstruktivis dipengaruhi oleh *The Linguistic Turn* maka peneliti merasa tepat untuk menggunakan teori sekuritisasi untuk lebih memperdalam *The Linguistic Turn* tersebut. Pada dasarnya *The Linguistic Turn* mencakup tiga hal yakni simbol-simbol linguistik memiliki fungsi konstitutif yang berarti membuat pihak lain melihat sesuatu sebagaimana yang kita bicarakan.⁴¹ *Securitization theory* yang dikembangkan oleh Barry Buzan dan Ole Wæver merupakan konsep yang paling menonjol dalam *Copenhagen School*. Dapat dikatakan bahwa keamanan adalah *speech act*. Dengan berbicara tentang keamanan, seorang aktor mencoba untuk mengalihkan topik dari politik ke dalam masalah keamanan, dengan demikian aktor tersebut mencoba melegitimasi isu dengan cara-cara luar biasa guna melawan ancaman yang dibangun secara sosial.⁴²

⁴² Barry Buzan, *Security: A New Framework for Analysis*. (Colorado: Lynne Rienner Publishers, 1998), 23-26.

Buzan bahwa sekuritisasi merupakan intersubjektif dan konstruksi sosial.⁴³

Dalam proses ini elit politik akan menyatakan sebuah isu yang menjadi ancaman yang nyata. Isu tersebut dapat dikatakan mengancam keamanan jika publik menerima ancaman yang dikonstruksi tersebut dengan memiliki persepsi ancaman sejalan dengan yang dikonstruksi oleh elit tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya langkah yang tepat dalam membujuk publik untuk setuju dengan konteks ancaman yang diwacanakan (proses sekuritisasi).

Secara sederhana sekuritisasi dapat dipahami sebagai sebuah proses untuk mendramatisasi sesuatu yang tadinya dianggap “normal” menjadi masalah “keamanan”.⁴⁴ Kesuksesan dalam proses sekuritisasi dapat tercapai apabila proses tersebut mencapai empat syarat sebagai berikut:⁴⁵

1. Kemampuan pelaku sekuritisasi (*securitizing actor*) dalam meyakinkan publik bahwa suatu obyek rujukan sedang menghadapi ancaman yang dapat berakibat fatal jika tidak ditangani secara cepat dan tepat. Sehingga dibutuhkan kesediaan data yang lengkap dan akurat yang mampu membuat publik menjadi panik terhadap ancaman tersebut.
2. Pernyataan (*speech act*) yang dipakai harus mampu meyakinkan publik bahwa objek tersebut sedang menghadapi

⁴³ Marianne Stone, "Security According to Buzan: A Comprehensive Security Analysis," *Security Discussion Paper Series 1*, 2-3.

⁴⁴ Barry Buzan, Waever, dan Wilde, *A New Framework for Analysis* (Colorado: Lynne Rienne Publisher, 1998), 26-33.

⁴⁵ Bob Sugeng Hadiwinata, *Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, alternatif, dan reflektifis* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), 187.

Publik yang menjadi audiens harus memiliki tingkat Pendidikan memadai dan akses informasi yang cukup untuk memahami pesan yang disampaikan dengan baik. Hal ini berguna untuk memastikan bahwa publik memahami *speech act* yang dilakukan pelaku sekuritisasi dan meresponnya dengan tindakan yang rasional.

Konteks sosial-ekonomi yang tepat akan berkontribusi terhadap proses sekuritisasi suatu isu. Seorang pelaku sekuritisasi akan berhasil dalam tindakannya apabila *speech act* diucapkan dalam konteks sosial-ekonomi yang tepat.

Konsep *Europeanization* sering kali terdengar dalam studi integrasi Eropa. Meskipun ada cukup kontestasi konseptual berkaitan dengan pertanyaan apa sebenarnya konsep tersebut, sebagian besar literatur berbicara tentang *Europeanization* adalah sebuah fenomena ketika sesuatu dalam sistem politik dalam negeri dipengaruhi oleh sesuatu di Eropa. Oleh karena itu kita dapat mendefinisikan *Europeanization* sebagai perubahan dalam negeri disebabkan oleh integrasi Eropa.

Sebagaimana dinyatakan di atas, *Europeanization* dapat didefinisikan sebagai perubahan dalam negeri disebabkan oleh integrasi Eropa. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah perubahan apa yang

Adapun Ladrech⁴⁸ menunjuk pada perubahan yang lebih umum, termasuk juga kewarganegaraan dan identitas nasional. Berdasar pada definisi ini, Radaelli⁴⁹ membuat konsepsi *Europeanization* yang mengacu pada proses (a) konstruksi, (b) difusi dan (c) pelembagaan aturan formal dan informal, prosedur, paradigma kebijakan, gaya, cara melakukan sesuatu dan berbagi keyakinan dan norma-norma dan konsolidasi dalam pembuatan keputusan Uni Eropa dan kemudian dimasukkan dalam logika wacana dalam negeri, identitas, struktur politik dan kebijakan publik.

Dampak domestik Eropenisasi dapat diartikan sebagai sebuah proses perubahan pada level domestik dimana negara anggota mengadaptasi proses, kebijakan, dan institusinya terhadap

⁴⁹ Claudio M. Radaelli, "Whither Europeanization? Concept stretching and substantive change", European Integration online Papers (EIoP) Vol. 4 (2000): 4

Melalui pendekatan *Top-Down* dapat dipahami bahwa integrasi Eropa mempengaruhi perubahan domestik dan hasil dari perubahan tersebut. Oleh karena itu, Eropanisasi dapat muncul ditengah perbedaan struktur pemerintah negara anggota Eropa seperti politik, hukum, dan institusi sosial berkaitan dengan pemecahan masalah politik yang membentuk interaksi antara aktor dan kebijakan-kebijakan Eropa. Eropanisasi dimaknai sebagai proses pembangunan institusi di tingkat Eropa guna menyelidiki bagaimana proses Eropanisasi ini berpengaruh terhadap negara

⁵¹ Tanja A. Borzel dan Thomas Risse, "Conceptualizing the Domestic Impact of Europe," dalam *The Politics of Europeanisation*, ed. Keith Featherstone et al. (Oxford: Oxford University Press, 2003), 58.

anggota. Hal tersebut menyimpulkan bahwa proses Eropanisasi tentunya mempengaruhi negara anggota Uni Eropa.

Semakin rendah kesesuaian proses, kebijakan, dan institusi antara Eropa dan domestik maka semakin tinggi tekanan untuk adaptasinya. Hal yang perlu digarisbawahi adalah jika Eropanisasi cocok atau sesuai dengan kondisi domestik maka perubahan domestik (*domestic changes*) tidak diperlukan. Secara umum, jika norma, peraturan, dan pemahaman kolektif Eropa sejalan dengan kebijakan pada norma dan peraturan pada level domestik maka tidak akan masalah-masalah kepatuhan. Kerangka kebijakan Eropa yang beriringan dengan kebijakan dan wacana domestik negara anggota tidak mungkin memicu *collective learning process* yang dapat merubah kepentingan dan identitas aktor.

Pada akhirnya, tekanan untuk adaptasi yang dihasilkan oleh fakta bahwa pemerintahan Eropa yang baru muncul mencakup struktur pengambilan keputusan yang otoritatif yang mungkin berbenturan dengan struktur nasional pembuatan kebijakan, dan bahwa negara-negara anggota Uni Eropa tidak memiliki opsi keluar karena undang-undang Uni Eropa merupakan hukum negara. Hal ini tentunya sangat berbeda bagi lembaga internasional lainnya yang pengaturan antar pemerintah nya bersifat sukarela

Menurut Borzel, terdapat dua jenis ketidaksesuaian antara kebijakan domestik dengan Eropenisasi yang mampu memunculkan tekanan untuk beradaptasi terhadap negara anggota.⁵³ Pertama, kebijakan Eropa dapat menyebabkan ketidakcocokan kebijakan (*policy misfit*) antara aturan dan peraturan Eropa dengan kebijakan domestik di negara anggota. Kebijakan pada dasarnya sama dengan masalah kepatuhan. Kebijakan Eropa dapat menentang tujuan kebijakan nasional, standar peraturan, instrumen atau teknik yang digunakan untuk mencapai tujuan kebijakan, dan/atau pendekatan pemecahan masalah yang mendasarinya.⁵⁴ Ketidaksesuaian kebijakan (*policy misfit*) semacam itu juga dapat memberi tekanan pada lembaga-lembaga yang mendasarinya. Karena *policy misfit* menghasilkan biaya adaptasi (*adaptational cost*) di tingkat domestik, negara-negara anggota berusaha untuk 'mengunggah' kebijakan mereka ke tingkat Eropa untuk mengurangi masalah kepatuhan mereka.⁵⁵

⁵⁵ Ibid., 62.

Sebagaimana dijelaskan oleh Olsen bahwa dampak domestik Eropenisasi dapat digambarkan sebagai sebuah proses perubahan di level domestik dimana negara anggota mengadaptasi proses, kebijakan, dan institusi menuju norma dan peraturan yang muncul dari Uni Eropa.⁵⁷ Dalam menjelaskan mekanisme perubahan domestik tersebut, penulis menggunakan penjelasan dari Olsen bahwa *collective understanding* yang muncul untuk menentukan mana yang baik dan mana yang tidak adalah terkonstruksi secara sosial dalam struktur pemerintahan yang ada. *Collective understandings* dan *intersubjective meanings* ini lah yang akan mempengaruhi cara aktor mendefinisikan tujuannya serta menentukan manakah aksi yang rasional dan tidak. Karena adanya

⁵⁷ Olsen dalam Tanja A. Borzel dan Thomas Risse, "Conceptualizing the Domestic Impact of Europe," dalam *The Politics of Europeanisation*, ed. Keith Featherstone et al. (Oxford: Oxford University Press, 2003) 63.

2. *Facilitating Factors* sebagai Faktor Pendorong Perubahan Domestik

Sedangkan, dalam pendekatan *agency-centered* lebih menitik-beratkan proses sosialisasi dimana aktor berusaha untuk menginternalisasikan norma dan peraturan baru yang tepat melalui proses perdebatan dan *social learning* untuk mendefinisi ulang kepentingan dan identitasnya.⁵⁸ Penjelasan ini juga memperjelas

[illegible]

Olsen juga menjelaskan bahwa semakin cocok norma dan ide Eropa dengan kondisi domestik di negara anggota maka akan lebih mudah terjadinya proses internalisasi norma dan ide tersebut begitu juga sebaliknya.⁵⁹ Agar internalisasi norma dan terciptanya identitas baru tersebut diperlukan adanya *mediating factor*, Dalam hal ini Borzel membagi dua jenis *mediating factor* yakni *change agents* dan *political culture*.

⁵⁹ Johan P. Olsen, "Europeanization and Nation-State Dynamics." Dalam *The Future of The Nations*, ed. Sverker Gustavsson et al. (New York: Routledge, 2004), 272.

⁶⁰ Tanja A. Borzel dan Thomas Risse, "Conceptualizing the Domestic Impact of Europe," dalam *The Politics of Europeanisation*, ed. Keith Featherstone et al. (Oxford: Oxford University Press, 2003), 67.

1. Absorption

2. Accommodation

⁶³ Tanja A. Borzel dan Thomas Risse, "Conceptualizing the Domestic Impact of Europe," dalam *The Politics of Europeanisation*, ed. Keith Featherstone et al. (Oxford: Oxford University Press, 2003), 69.

membantu untuk menginternalisasi norma dan ide baru yang muncul maka akan muncul *inertia* yang dapat diartikan sebagai tidak adanya perubahan dalam domestik negara anggota. Dalam kondisi tersebut perubahan domestik dapat terjadi jika ada paksaan keras dari pihak eksternal dalam hal ini adalah Uni Eropa. Sedangkan jika tidak ada *facilitating factors* yang memediasi penerimaan norma dan ide baru dari Uni Eropa maka tidak akan ada perubahan dalam domestik negara anggota.

Jika tekanan adaptasi yang diberikan sedang dan terdapat *facilitating factors* maka akan terjadi transformasi secara bertahap terhadap domestik negara anggota. Sedangkan jika tidak ada *facilitating factors* maka hanya akan terjadi *accommodation* atau *absorption*. Terakhir jika tekanan adaptasi rendah dan terdapat *facilitating actors* maka *accommodation* akan terjadi di domestik negara anggota, tetapi jika tidak ada *facilitating factors* maka hanya akan terjadi *absorption*.

g akan digunakan peneliti dalam rangka mengumpu
melakukan analisis pada data yang telah didapatkan.
ti juga akan memberikan penjelasan rancangan
n untuk menjawab rumusan masalah yang ada.
ris besar, peneliti memilih jenis penelitian k
di kasus atas dasar pertimbangan fokus peneliti
g spesifik atas suatu kasus tunggal yakni respons P
si di Eropa. Dalam menggali informasi atau data
teknik dokumentasi karena peneliti lebih banyak
yang tersebar luas baik dalam bentuk buku maupun

Secara garis besar, peneliti memilih jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus atas dasar pertimbangan fokus peneliti untuk menggali informasi yang spesifik atas suatu kasus tunggal yakni respons Polandia terhadap krisis pengungsi di Eropa. Dalam menggali informasi atau data tersebut peneliti menggunakan teknik dokumentasi karena peneliti lebih banyak memanfaatkan data sekunder yang tersebar luas baik dalam bentuk buku maupun berita-berita di internet.

42

dependen yaitu yang dampaknya terhadap unit analisis hendak peneliti amati.

D. Tahap-Tahap Penelitian

1. Pemilihan Tema, Topik, dan Kasus

Pada tahap ini peneliti meyakinkan diri bahwa peneliti mampu dan menguasai kasus yang akan dipilih. Peneliti memilih kasus krisis pengungsi di Eropa karena peneliti tertarik dengan penelitian studi Eropa dan tertarik memilih Polandia sebagai subyek penelitian karena peneliti tertarik untuk menganalisis identitas Polandia sebagai negara yang pernah ‘jatuh-bangun’ selama tiga kali dalam jangka waktu kurang lebih 10 abad. Dalam tahap ini peneliti memilih tema dan studi kasus terlebih dahulu, kemudian menentukan unit analisis, dan yang terakhir menentukan judul.

2. Pembacaan Literatur

Setelah peneliti memperoleh kasus, peneliti mengumpulkan literatur atau bahan bacaan sebanyak-banyaknya berupa jurnal, artikel, hasil penelitian terdahulu, berita di internet, *policy brief* yang terkait dengan kasus tersebut.

3. Perumusan Masalah Penelitian

Setelah membaca literatur terkait, peneliti menentukan rumusan masalah.

4. Pengumpulan data

Setelah menentukan fokus permasalahan, peneliti kembali mengumpulkan data baik sekunder dan primer. Pengumpulan data terus berlanjut hingga peneliti yakin bahwa data yang ditemukan mampu menjawab rumusan masalah secara paripurna.

5. Pengolahan data

Setelah melakukan pengumpulan data, peneliti melakukan klasifikasi data guna mempermudah pembaca memahami data yang peneliti sajikan dan memudahkan peneliti untuk melakukan analisis data.

6. Analisis data

Dalam hal tahap analisis data, peneliti berusaha menjawab rumusan masalah dengan data yang ada dan dikemas dalam kerangka teoritik sebagai alat analisis.

7. Kesimpulan

Pada tahap ini peneliti berusaha meringkas hal-hal yang telah disampaikan di bab sebelumnya.

8. Laporan Penelitian

Tahap ini merupakan tahap terakhir yang dilakukan peneliti. Bagian ini merupakan salah satu pertanggung jawaban peneliti yang disampaikan melalui tulisan untuk kepentingan umum.

E. Teknik Pengumpulan Data

Sebagian besar informasi yang didapatkan dalam penelitian ini diperoleh melalui data sekunder dan data primer. Sumber data sekunder yang dijadikan referensi ialah buku, artikel, laporan tahunan, rekaman

Menurut Sugiyono, dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar-gambar, atau karya monumental dari seseorang.⁶⁸ Dokumentasi merupakan pengumpulan data oleh peneliti dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dari sumber yang terpercaya. Pengumpulan data dengan teknik dokumentasi ini dilakukan oleh peneliti guna mengumpulkan data dari berbagai hal media cetak yang membahas hal-hal yang terkait dengan topik yang diteliti.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis interaktif Miles dan Huberman atau biasa dikenal dengan model interaktif. Menurut Miles dan Huberman, analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sampai tuntas.⁶⁹ Komponen dalam analisis data sebagai berikut:

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis interaktif Miles dan Huberman atau biasa dikenal dengan model interaktif. Menurut Miles dan Huberman, analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sampai tuntas.⁶⁹ Komponen dalam analisis data sebagai berikut:

⁶⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 240.

[illegible]

Dalam melakukan keabsahan data yang telah terkumpul, peneliti melakukan diskusi dengan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang relevan diantaranya dosen pembimbing dan teman sesama mahasiswa. Peneliti juga melakukan observasi secara terus menerus terhadap subyek yang diteliti. Hal ini dikarenakan studi kasus yang dipilih peneliti cukup tergolong kontemporer.

Dalam melakukan keabsahan data yang telah terkumpul, peneliti melakukan diskusi dengan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang relevan diantaranya dosen pembimbing dan teman sesama mahasiswa. Peneliti juga melakukan observasi secara terus menerus terhadap subyek yang diteliti. Hal ini dikarenakan studi kasus yang dipilih peneliti cukup tergolong kontemporer.

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

Setelah peneliti menjelaskan teori konstruktivisme, sekuritisasi, dan eropanisasi sebagai landasan teoritik pada bab II. Pada bab ini peneliti akan memaparkan data-data yang relevan dengan topik penelitian. Kemudian di bagian akhir bab, peneliti akan menganalisis data tersebut dengan landasan teoritik yang telah dijelaskan di bab II.

Berdasarkan teori konstruktivisme, terdapat tiga hal penting yang peneliti tekankan sebagai alasan atau penyebab inkonsistensi respons Polandia terhadap krisis pengungsi di Eropa yakni identitas, *linguistic turn*, agen dan struktur. Pertama, pada aspek identitas telah ditemukan tiga identitas mendasar yang dimiliki oleh Polandia yakni: 1) Benteng kekristenan Eropa; 2) Homogen dalam sisi agama dan etnis; 3) Norma dan nilai yang tidak sepenuhnya sama dengan Uni Eropa. Kedua, dari sisi *linguistic turn* peneliti menemukan adanya sekritisasi pengungsi yang dianggap berbahaya bagi Polandia. Konstruksi ini dimulai oleh aktor negara seperti pemerintah Polandia dan elit politik Partai PiS kemudian bergulir ke aktor non negara seperti CBOS yang membuat jajak pendapat yang menunjukkan bahwa 75% masyarakat Polandia tidak setuju untuk menerima pengungsi. Ketiga, Kesuksesan sekritisasi tersebut berujung pada tidak adanya *facilitating factor* sebagai agen untuk mendukung terealisasinya *European refugee relocation plan* di Polandia sebagaimana dijelaskan oleh konsep Eropanisasi.

Selama kurang lebih satu abad, Byzantium mengalami perpecahan dan penyusutan kultur. Sehingga Byzantium semakin jauh dari kalimat *eternal and continuous procession towards a higher form of existence*. Kondisi yang berbeda terlihat di barat dimana mereka terus meningkatkan peradabannya. Sebagai misi penyelamatannya agar Byzantium tetap eksis maka ia meminjam konsep peradaban barat namun tidak secara langsung dengan menggunakan budaya latin yang ada di Yunani yang mana budaya itu sendiri merupakan warisan dari barat⁷⁵. Dalam hal ini, Kłoczowski, mendefinisikan barat sebagai *dynamic development* maka dari itu barat memiliki kemajuan peradaban yang sangat impresif sedangkan timur sebagai *persisting civilization*.

Menurut sejarawan Polandia, Potkański, bangsa Slavia termasuk Polandia, tidak dapat memungkiri bahwa gereja barat telah memenangkan proses peradaban sehingga mau tidak mau bangsa Slavia harus mengikuti peradaban barat. *The Slavic nations, including Poles, “have no reason to*

⁷⁵ Ibid.

*regret following the West because, ultimately, it is the West that has won the great civilizational procession and it is the West that remained”.*⁷⁶

Namun, hal tersebut tidak lantas membuat Polandia menjadi sebuah negara yang masuk ke dalam kategori *western country*. Meminjam istilah yang dibuat oleh Edward W. Said yaitu orientalisme.⁷⁷ Jika kita melihat Kristen orthodox yang berkembang di Polandia denganacamata orientalisme maka dapat dipahami bahwa orthodox bersifat tidak logis, terbelakang, stagnan, dan tidak memiliki kontribusi terhadap perkembangan dunia⁷⁸.

Polandia juga sering disebut sebagai benteng kekristenan di Eropa. Hal itu dikarenakan pada tahun 1630an Polandia menghentikan invasi Kekaisaran Islam Turki.⁷⁹ Terlebih lagi pada tahun 1683, pasukan Polandia yang dipimpin oleh King Jan III Sobieski membantu Kekaisaran Suci Roma untuk menghentikan pengepungan Vienna oleh Kekaisaran Turki. Kemenangan itu pun diraih oleh Polandia yang menjadikan cerita akhir bagi ekspansi Kekaisaran Turki.⁸⁰ Berdasarkan sejarah tersebut, selama berabad-abad Polandia telah mengkonstruksi dirinya sebagai *Christian fighter*, pelindung *the Eastern borders* melawan *non-believer*.

Konstruksi sejarah yang seperti ini adalah salah satu faktor terbesar yang

⁷⁶ Janion Maria, "Poland between the West and East," *Teksty Durgie: Special Issue English Edition* 1 (2014): 15.

⁷⁷ Ibid., 21.

⁷⁸ Ibid.

⁷⁹ Lukasz Kaminski dan Maciej Korkuc, *A guide to the history of Poland* (Krakow: Instytut Pamieci Narodowej, 2016), 32.

⁸⁰ Educational Materials for International Student Tours to Holocaust Sites in Poland: History of Poland-Timeline. Diakses 2 Juli 2018 melalui <http://www.galiciajewishmuseum.org/>.

Keberhasilan Polandia dalam melindungi Eropa juga terjadi lagi ketika pasukan Polandia berhasil meruntuhkan kekuatan pasukan Bolshevik di perbatasan Warsawa pada tahun 1920. Ancaman pasukan Bolshevik memasuki Warsawa adalah hancurnya budaya dan identitas Eropa dengan menciptakan sebuah revolusi di tanah Eropa. Namun, pasukan Polandia berhasil memukul mundur Bolshevik dan mencegah hancurnya peradaban Eropa.

Rusia, Jerman dan Austria.

⁸² Mach Zdzislaw, “Polish National Culture and its Shifting Centres”, Centre for European Studies Journal (2000): 1-15, www.humanityaction.org/files/278-Polish_National_Culture_and_its_Shifting_Centres.pdf.

Pasca perang dunia II, Polandia berada di bawah pemerintahan komunis Uni Soviet yang berdampak pula pada putusya hubungan antara Eropa dan Polandia. Polandia mendapat pandangan sebagai negara timur yang komunis, kemiskinan dimana-mana, krisis ekonomi permanen, pelanggaran hak asasi manusia, dan atheis⁸³. Sehingga jauh dari kata

[illegible]

memenuhi kriteria sebagai negara Eropa yang mapan, ber-demokrasi, dan berkeyakinan.

Hingga akhirnya di tahun 1989-an muncul sebuah slogan politik “*return to europe*” yang merupakan awal mula terjadinya transformasi besar di dalam berbagai aspek di Polandia pasca runtuhnya kekuasaan komunis Uni Soviet. Slogan itu juga menjadi bagian dari agenda besar Polandia untuk mengubah perspektif masyarakat Eropa terhadap Polandia sehingga terbuka ruang bagi Polandia untuk bergabung ke dalam organisasi supranasional Uni Eropa. Ide tersebut muncul dipengaruhi oleh aspek historis yang diyakini bangsa Polandia⁸⁴. Selama satu abad terakhir, Mitologi bangsa Polandia sendiri mengklaim dirinya sebagai pelindung masyarakat Eropa, barat, umat Kristen hingga budaya Latin atas serangan yang datang dari budaya-budaya yang masuk. Mitologi nasional Polandia mulai terbentuk pada abad 19 ketika bangsa Polandia dipenuhi oleh masyarakat yang anti terhadap kebangkitan militer Rusia pada tahun 1830 hingga 1863. Pada saat perang Napoleon, Polandia mendukung Perancis berperang dengan Rusia agar ketika Perancis menang, kemerdekaan dapat tercipta lagi di Polandia. sehingga hal tersebut memberi gambaran terhadap masyarakat Polandia bahwa Perancis sebagai simbol kebebasan dan peradaban Eropa sedangkan Rusia sebagai simbol masyarakat barbar. Dalam hal ini, seniman mengambil peran yang cukup besar dalam proses pembentukan identitas nasional Polandia. Peperangan ini kemudian

⁸⁴ Ibid., 1-2.

diangkat oleh seniman musik, seni rupa, literatur, hingga theater di abad 19 sebagai sejarah mitologi bangsa Polandia sekaligus menjadi identitas politik Polandia.⁸⁵

Fakta mengenai diabaikannya Polandia dalam beberapa kurun waktu dapat dipahami ketika melihat sifat hubungan antara Polandia dengan Eropa. Dalam jurnal yang ditulis Mach, hubungan yang terbentuk antara Polandia dengan Eropa bersifat asimetris⁸⁸. Kontribusi Polandia terhadap kemajuan peradaban Eropa yang minim membuat Eropa tidak lebih membutuhkan Polandia melainkan, Polandia yang lebih membutuhkan Eropa. Terlebih, pengaruh Eropa terhadap Polandia jauh lebih besar dibandingkan pengaruh Polandia terhadap Eropa. Sehingga hal tersebut menciptakan suatu pandangan bahwa Polandia merupakan negara *periphery* di lingkup Eropa.

⁸⁷ “Learn the History of Poland in 10 Minutes,” Culture.PL, diakses 08 Juli 2018

[illegible]

Ketika Polandia bertransformasi menjadi negara komunis dibawah kekuasaan Soviet, komunis Polandia membentuk dua pusat yang berfokus pada Politik dan Ekonomi. Pembagian ini dilakukan dalam rangka melancarkan misi sovietisasi Polandia di berbagai aspek kehidupan masyarakat dan pemerintahannya. Sovietisasi ini sifatnya mengintervensi dan mendominasi proses pembuatan keputusan Polandia baik di lingkup domestik maupun mancanegara. Dampaknya adalah adanya perubahan konsep dalam budaya pemilihan pemimpin daerah, birokrasi, kekuasaan, dan properti dan lainnya. Meskipun begitu, Sovietisasi yang dilakukan tidak berdampak pada ideologi rakyat Polandia. Polandia tidak memandang Soviet sebagai pusat peradaban dunia dan tidak layak menyandang gelar panutan dikarenakan sifatnya yang primitif dan barbarian⁹⁰. Berbeda dengan pandangan Soviet terhadap Polandia, Soviet dan negara timur yang lain memandang Polandia sebagai sumber nilai-nilai peradaban dimana Polandia menerima pencampuran budaya antara Eropa Barat dan Timur dikarenakan letaknya yang cukup strategis. Maka, dalam hal ini dapat dilihat bahwa terdapat kesamaan perlakuan terhadap negara periphery ketika negara tersebut merasa dirinya negara core.

⁹⁰ Ibid., 8.

Ia juga menambahkan bahwa identitas Polandia juga terbentuk secara natural melalui banyaknya konfrontasi yang telah ia lalui terhadap negara-negara tetangganya⁹². Salah satu contohnya adalah Jerman. Polandia memandang Jerman sebagai negara yang berbahaya, ambisius akan kekuasaan, dan merupakan musuh lama Polandia. Namun, di satu sisi Polandia juga meyakini Jerman sebagai pusat peradaban yang memiliki prinsip yang sama dengan peradaban Eropa. Harapan rakyat Polandia agar dapat menjalin hubungan kembali di Eropa masih besar, banyak masyarakatnya yang berpendapat bahwa apa yang telah dilakukan oleh rakyat Polandia dalam melindungi Eropa seharusnya layak untuk di apresiasi dan mendapat perlakuan yang lebih baik oleh negara-negara Eropa⁹³.

Di tahun 1989, ketika Mikhail Gorbachev turun dari jabatannya sebagai presiden Rusia, sekaligus menandakan runtuhnya kekuasaan Uni Soviet sehingga harus terpecah dan lepas dari negara-negara satelitnya.

⁹¹ Mach Zdzislaw, “Polish National Culture and its Shifting Centres”, Centre for European Studies Journal (2000): 10, [www.humanityaction.org/files/278-Polish National Culture and its Shifting Centres.pdf](http://www.humanityaction.org/files/278-Polish%20National%20Culture%20and%20its%20Shifting%20Centres.pdf).

⁹² Ibid., 9.

⁹³ Mach Zdzislaw, "Polish National Culture and its Shifting Centres", 8.

Pada tanggal 25 September 1989. Menteri luar negeri Polandia bernama Krzysztof Skubizweski mendatangi konferensi PBB untuk mengkonfirmasi mengenai pernyataan Polandia yang bersedia untuk kembali pada Eropa, tempat dimana seharusnya ia berada. Dalam hal ini Polandia semakin dekat dengan Eropa. 30 Januari 1990, Mazowickie sebagai perdana menteri Polandia menghadiri rapat dewan negara-negara Eropa untuk mengkonfirmasi bahwa Polandia telah memenuhi syarat sebagai anggota persatuan negara Eropa. Dalam deklarasi tersebut Mazowickie menjelaskan bahwa Polandia kini sepenuhnya telah memegang teguh nilai-nilai demokrasi, kebebasan, hak asasi manusia, dan pluralisme⁹⁵.

Elit dan masyarakat Polandia meyakini bahwa keterlibatan mereka dalam European Union akan memberikan dampak positif di berbagai bidang. Yang pertama dalam segi ekonomi, masyarakat Polandia akan memiliki keuntungan ekonomi yang cukup menggiurkan sekaligus hal

⁹⁵ Mach Zdzislaw, “Polish National Culture and its Shifting Centres”, Centre for European Studies Journal (2000): 11, www.humanityaction.org/files/278-Polish_National_Culture_and_its_Shifting_Centres.pdf.

Pengklaiman Negara Polandia sebagai negara Eropa kini telah menjadi salah satu identitas nasional Polandia. Begitu pula dengan perubahan sosial yang saat ini terjadi di Polandia, dimana mereka melibatkan transformasi peradaban Eropa ke dalam identitas nasional. *Return to Europe*, diangkat dari sebuah kisah sejarah peperangan, menjadi sebuah slogan politik dibalik adanya transformasi besar yang terjadi di Polandia, sebuah proses Polandia masuk ke dalam organisasi supranasional Uni Eropa. Terdapat sebuah keinginan dan keseriusan yang sangat besar untuk ikut berkontribusi dalam pusat peradaban barat. Keseriusan tersebut tercermin dalam sikap politik domestiknya yang selalu menjadikan barat sebagai referensi politiknya. Namun, kini tidak sepenuhnya mereka sejalan dengan pemikiran barat.

[illegible]

Berbicara mengenai identitas Polandia terhadap Eropa, tentunya terdapat hal-hal yang sifatnya masih kontras satu sama lain. Disini terdapat perbedaan ketika Polandia memasuki Uni Eropa dibanding negara-negara lain yang turut ikut dalam Uni Eropa. Perbedaan tersebut terletak pada kerasnya Polandia dalam mempertahankan nilai-nilai identitas nasional mereka. Dalam beberapa nilai yang dianggap kontradiktif dengan nilai identitas nasional Polandia maka Polandia akan memilih untuk mempertahankan nilai nasionalnya tersebut daripada melakukan asimilasi atau penyesuaian antara nilai yang dianut dengan nilai-nilai Eropa yang dijunjung saat ini. Bahkan, Polandia mempunyai agenda sendiri yang berbeda dengan Uni Eropa yaitu menanamkan kembali nilai-nilai terdahulu yang telah ditinggalkan di pusat Eropa⁹⁸.

⁹⁶ Mach Zdzislaw, "Polish National Culture and its Shifting Centres", Centre for European Studies Journal (2000): 13, [www.humanityaction.org/files/278-Polish National Culture and its Shifting Centres.pdf](http://www.humanityaction.org/files/278-Polish%20National%20Culture%20and%20its%20Shifting%20Centres.pdf).

⁹⁷ Ibid., 13.

⁹⁸ Mach Zdzislaw, "Polish National Culture and its Shifting Centres", 13.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat bagaimana sejarah cukup mampu membuat identitas kristen sangatlah melekat di Polandia. Konstruksi identitas tersebut juga tidak lepas dari demografi masyarakat Polandi yang homogen baik secara etnis dan agama. Berdasar pada teori konstruktivisme, peneliti berasumsi bahwa identitas tersebutlah yang menjadi alasan mengapa Polandia tidak menerima pengungsi muslim.

[illegible]

melalui beberapa penyesuaian. Hal ini dikarenakan sejarah Polandia termasuk perdebatan antara Barat-Timur dan Polandia dari negara komunis satelit Uni Soviet hingga demokrasi.¹⁰⁰

Secara norma dan nilai, Polandia memiliki keanggotaan Eropa karena legitimasi dan akar sejaranya. Selain itu, pada bersamaan, usaha akses Uni Eropa terhadap Polandia dalam proses transformasi Polandia dari negara sosialis menuju sistem politik demokrasi ala barat. Oleh karena itu Polandia dengan Uni Eropa karena menganggap bahwa Uni Eropa akan untuk transformasi politiknya dan berorientasi ke-barat-an

melalui beberapa penyesuaian. Hal ini dikarenakan sejarah Polandia termasuk perdebatan antara Barat-Timur dan Polandia dari negara komunis satelit Uni Soviet hingga demokrasi.¹⁰⁰

Secara norma dan nilai, Polandia memiliki keanggotaan Eropa karena legitimasi dan akar sejaranya. Selain itu, pada bersamaan, usaha akses Uni Eropa terhadap Polandia dalam proses transformasi Polandia dari negara sosialis menuju sistem politik demokrasi ala barat. Oleh karena itu Polandia dengan Uni Eropa karena menganggap bahwa Uni Eropa akan untuk transformasi politiknya dan berorientasi ke-barat-an

melalui beberapa penyesuaian. Hal ini dikarenakan sejarah Polandia termasuk perdebatan antara Barat-Timur Polandia dari negara komunis satelit Uni Soviet hingga demokrasi.¹⁰⁰

Secara norma dan nilai, Polandia memiliki keanggotaan Eropa karena legitimasi dan akar sejaranya. Selain itu, persamaan, usaha akses Uni Eropa terhadap Polandia dalam proses transformasi Polandia dari negara sosialis menuju sistem politik demokrasi ala barat. Oleh karena itu Polandia bergabung dengan Uni Eropa karena menganggap bahwa Uni Eropa akan membantu transformasi politiknya dan berorientasi ke-barat-an.

melalui beberapa penyesuaian. Hal ini dikarenakan sejarah Polandia termasuk perdebatan antara Barat-Timur Polandia dari negara komunis satelit Uni Soviet hingga demokrasi.¹⁰⁰

Secara norma dan nilai, Polandia memiliki keanggotaan Eropa karena legitimasi dan akar sejaranya. Selain itu, persamaan, usaha akses Uni Eropa terhadap Polandia dalam proses transformasi Polandia dari negara sosialis menuju sistem politik demokrasi ala barat. Oleh karena itu Polandia bergabung dengan Uni Eropa karena menganggap bahwa Uni Eropa akan membantu transformasi politiknya dan berorientasi ke-barat-an.

melalui beberapa penyesuaian. Hal ini dikarenakan sejarah Polandia termasuk perdebatan antara Barat-Timur Polandia dari negara komunis satelit Uni Soviet hingga demokrasi.¹⁰⁰

Secara norma dan nilai, Polandia memiliki keanggotaan Eropa karena legitimasi dan akar sejaranya. Selain itu, persamaan, usaha akses Uni Eropa terhadap Polandia dalam proses transformasi Polandia dari negara sosialis menuju sistem politik demokrasi ala barat. Oleh karena itu Polandia bergabung dengan Uni Eropa karena menganggap bahwa Uni Eropa akan membantu transformasi politiknya dan berorientasi ke-barat-an.

Dari sisi ekonomi, Polandia mendapatkan peningkatan positif pasca bergabung dengan Uni Eropa yang direfleksikan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi hingga 6,5% dan meningkatnya pertumbuhan konsumsi sebesar 6% per tahun. Pengangguran di Polandia pun juga berkurang sejak bergabung dengan Uni Eropa, hanya dalam kurun waktu empat tahun (2004 – 2008), dari 20% menjadi 11,4%. Tidak hanya pengangguran, gaji rata-rata meningkat dari 537 euro menjadi 850 euro dan *Foreign Direct Investment* (FDI) juga meningkat dari 3,7 miliar euro menjadi 12,8 miliar euro. Hal tersebut berarti dalam kurun waktu

[illegible]

Secara keseluruhan, keanggotaan Polandia di Uni Eropa sangat krusial bagi identitas Polandia, kepentingan ekonomi dan militernya, serta kekuatannya. Menyerahkan sebagian kebijakan terhadap Uni Eropa dianggap tidak ada apa-apanya dibanding dengan kompensasi yang didapatkan oleh Polandia sebagaimana mampu melegitimasi Polandia sebagai kekuatan besar di *Central Eastern Europe*.

Saat ini partai politik yang berkuasa di Polandia adalah *Law and Justice Party* (PiS). Sebagai partai populis dan sayap kanan, PiS belakangan ini semakin banyak sekali menerima kecaman dari media-media asing karena sikapnya yang semakin bertentangan dengan norma-norma demokrasi seperti memperlakukan kebebasan sipil dan kontrol terhadap media yang berlebihan.

Meskipun mendapatkan protes dari pihak luar, PiS masih mendapatkan dukungan dan popularitas yang tinggi dari dalam negerinya. Hal itu dikarenakan pernyataan yang sangat ‘nasionalis’ yang dilontarkan oleh kadernya. Salah satunya adalah Szydlo yang menyatakan bahwa “berada di Uni Eropa bukan berarti menerima pembenaran politik, akan

Dikutip dari *Foreign Affairs*, PiS mendefinisikan *a true European* atau orang-orang Eropa sesungguhnya adalah berkulit putih dan beragama Kristen dengan kepercayaan tradisional nya terhadap keluarga dan seksualitas serta memiliki kewaspadaan terhadap *non-white people* khususnya Muslim. Berdasarkan ide tersebut, Kristen dikonstruksi sebagai penanda peradaban yang membedakan Eropa dari dunia Muslim.

Ide dan pandangan seperti itu sudah sangat bi Polandia terlebih lagi hal ini dikarenakan ide dan pand diekspresikan dengan legitimasi negara melalui perny pemerintah. Kepopuleran PiS di Polandia juga menyebab mudah diterima oleh masyarakat, ditambah lagi kare ekonomi Polandia di bawah kepemimpinan partai PiS Pertumbuhan ekonomi tersebut sangat jelas dapat dirasa Polandia karena program strategis yang dibuat oleh p berpihak kepada masyarakat seperti kebijakan insentif bag memiliki anak-anak, peningkatan usia pension, dll. Kes diterima masyarakat Polandia tersebut menjadikan mere memperhatikan telah berapa banyak nilai-nilai demokras oleh pemerintah Polandia sebagaimana diutarakan ol asing.

Sebagaimana kita tahu bahwa pada tahun 2015 telah ditetapkan adanya *European Refugee Relocation Plan* sebagai pengganti *Dublin Regulation* guna mengatasi menumpuknya pengungsi di Italia dan Yunani. Berdasarkan *European Refugee Relocation Plan*, sekitar 98.255 pengungsi yang terdapat di Italia dan Yunani akan disebar ke negara anggota Uni Eropa termasuk Polandia. Pada bulan September 2015, pemerintah Polandia mendeklarasikan untuk menerima 7082 pengungsi dari Italia dan Yunani dibawah *European Refugee Relocation Plan*.¹⁰⁶ Meskipun begitu *European Commission* mengharapkan Polandia untuk menerima 6182 pengungsi.¹⁰⁷ Pemerintah Polandia yang pada saat itu dikuasai oleh Partai PO (*Civic Platform*) dan Partai PSL (*Polish People Party*) juga berjanji untuk merelokasi 100 pengungsi ke negaranya.¹⁰⁸

¹⁰⁶ Anna Pilat dan Dominika Potkanska, *Local responses to the refugee crisis in Poland* (Warsaw: Institute of Public Affairs, 2017), 6.

¹⁰⁷ Senada Selo Sabic, *The Relocation of Refugees in the European Union* (Zagreb: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2017), 6.

¹⁰⁸ Anna Pilat dan Dominika Potkanska, *Local responses to the refugee crisis in Poland* (Warsaw: Institute of Public Affairs, 2017), 6.

¹⁰⁸ Anna Pilat dan Dominika Potkanska, *Local responses to the refugee crisis in Poland* (Warsaw: Institute of Public Affairs, 2017), 6.

¹⁰⁹ Ibid., 7.

¹¹⁰ Anna Pilat dan Dominika Potkanska, *Local responses to the refugee crisis in Poland* (Warsaw: Institute of Public Affairs, 2017), 7.

[illegible]

Hal tersebut sangatlah kontras dengan identitas yang dibawa oleh pengungsi dari Timur Tengah dan Afrika Utara yang beragama Islam. Pembentukan opini bahwa pengungsi dengan identitasnya tersebut berbahaya dapat terlihat dari pernyataan Kaczynski bahwa *“migrants carry all sorts of parasites and protozoa, which ... while not dangerous in the organisms of these people, could be dangerous here.”*¹¹⁶ Secara terang-terangan Kaczynski menyatakan bahwa pengungsi tersebut berbahaya dan harus dihindari dengan cara melakukan penolakan terhadap pemberlakuan relokasi pengungsi sebagaimana dimandatkan oleh Uni Eropa.

Penggambaran identitas pengungsi tersebut semakin diperparah oleh pernyataan Blaszczak, mantan Menteri Dalam Negeri Polandia, yang menyatakan bahwa, *“letting even a single refugee into the country would risk turning it into a breeding ground for terrorists. Poland must therefore*

¹¹⁶ “Migrants carry ‘parasites and protozoa,’ warns Polish opposition leader,” *Político*, diakses 08 Juli 2018, <https://www.politico.eu/article/migrants-asylum-poland-kaczynski-election/>.

*defend the continent's Christian civilization from the Islamic fighters who threaten to kill us".*¹¹⁷

Sebagaimana peneliti lihat dari beberapa pernyataan di atas, penggunaan diksi kata juga memberikan pengaruh terhadap bagaimana masyarakat melihat suatu isu tersebut. Hal tersebut terlihat melalui perubahan opini publik terhadap pengungsi selama dua tahun partai PiS berkuasa. Retorika anti pengungsi yang selalu didengungkan dapat merubah 75% masyarakat Polandia yang pada awalnya setuju untuk menampung pengungsi secara sementara menjadi 75% masyarakat Polandia menolak ide tersebut.¹¹⁸ Jajak pendapat yang dilakukan oleh CBOS tersebut menunjukkan mayoritas masyarakat Polandia menolak untuk hidup berdampingan bersama pengungsi.

Ketidakpatuhan Polandia tersebut membuat Uni Eropa melakukan *infringement procedures* pada tahun 2017.¹¹⁹ Berdasarkan *EU treaties*, *European Commission* dapat menempuh jalur hukum, *infringement procedures*, terhadap negara anggota Uni Eropa yang gagal dalam mengimplementasikan hukum Uni Eropa. *European Commission* dapat mengajukan kasus tersebut kepada *European Court of Justice* untuk

¹¹⁷ “Poland, History, And The Refugee Crisis: Warsaw’s Response Calls For A Sobering Look To The Past,” Voxeurop, diakses 08 Juli 2018, <https://voxeurop.eu/en/2017/poland-and-refugee-crisis-5121327>.

¹¹⁸ „Stosunek do przyjmowania uchodźców”, Centrum Badania Opinii Społecznej 2017, 2.

¹¹⁹ “Europe Monthly Report,” *UNHCR*, Februari 2018, 11.

memberikan *financial penalties* atau hukuman berupa denda terhadap negara anggota yang melanggar tersebut.¹²⁰

Berdasarkan pengamatan peneliti melalui rekaman video perdebatan pengungsi di Parlemen Polandia¹²¹ menunjukkan bahwa Partai PiS yakin kebijakan untuk tidak merelokasi pengungsi adalah hak negaranya. Bahkan ia menganggap jika Uni Eropa memaksa Polandia untuk menerima pengungsi maka itu adalah sebuah pelanggaran kedaulatan sebagaimana yang Kaczynski katakan, *“On top of that, we believe that taking such decisions without our consent.. clear consent of the nation -and such consent doesn’t exist- violate the constitution. Yes... it is a violation of the constitution, a violation of the country’s sovereignty and also a violation of citizenship rights”*.

Dalam pidato tersebut Kaczynski juga mengatakan bahwa pengungsi adalah ancaman yang dapat membahayakan negaranya. Pimpinan partai PiS tersebut juga yakin bahwa pengungsi tidak akan mematuhi peraturan yang ada di Polandia termasuk tradisi yang ada di Polandia. Lebih dari itu, Kaczynski berusaha menggambarkan bahwa pengungsi tersebut adalah ancaman dengan menganalogikan insiden yang terjadi di negara Eropa lain sebagaimana berikut ini:

If anyone says that this is not true, then have a look around Europe. In Sweden, for instance, there are 54 no-go zones where

¹²⁰ “Infringement Procedure,” European Commission, diakses 08 Juli 2018, https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/applying-eu-law/infringement-procedure_en.

¹²¹ Debate on immigration, refugees in Polish parliament. Jaroslaw Kaczynski speech 2015. https://youtu.be/6NIRstWinSU?list=PLPgIA3PKxvHzeoaa8lu_m_Pb5zgsVA4i

Pernyataan tersebut muncul karena tidak terlepas dari respon Polandia terhadap krisis pengungsi di Eropa yang cenderung inkonsisten. Presiden Polandia itu pun kembali menambahkan bahwa, “.....*we can not force a solution onto ourselves that a contradictory with our tradition, culture, and a custom that we used to.*” Hal tersebut menjadi sangat jelas bahwa perbedaan identitas yang dimiliki oleh Polandia dengan para pengungsi menjadi salah satu alasan mengapa Polandia tidak bisa merelokasi pengungsi tersebut.

Hal tersebut tidaklah jauh berbeda dengan jajak pendapat yang dilakukan oleh CBOS pada tahun 2015 yang menunjukkan bahwa sebanyak 44% masyarakat Polandia memiliki persepsi negatif terhadap agama Islam, 33% memiliki sikap ambivalen terhadap Islam, dan hanya 23% masyarakat yang memiliki persepsi positif terhadap Islam. Persepsi negatif tersebut muncul karena tidak lepas dari kekerasan, intoleransi, perang, dan aksi terorisme yang sering diasosiasikan dengan pemeluk agama Islam.¹²⁴

¹²³ Poland doesn't want refugees because they're Muslims – Polish film director. Russia Today, https://youtu.be/nwxixui6REg?list=PLPgeIA3PKxvHzeoaa8lu_m_Pb5zgsVA4i

[illegible]

Analisis Data

Berdasarkan data-data yang telah dipaparkan di sub bab sebelumnya, peneliti akan menganalisis data menggunakan pendekatan teori yang telah dijelaskan di bab sebelumnya. Peneliti akan menggunakan konstruktivisme sebagai teori induk yang akan menjelaskan penemuan inkonsistensi Polandia terhadap krisis pengungsi di Eropa berdasarkan identitasnya. Secara lebih lanjut peneliti akan menjelaskan data

Berdasarkan data-data yang telah dipaparkan di su

sebelumnya, peneliti akan menganalisis data menggunakan pendekatan teori yang telah dijelaskan di bab sebelumnya. Peneliti akan menggunakan konstruktivisme sebagai teori induk yang akan menjelaskan pen inkonsistensi Polandia terhadap krisis pengungsi di Eropa berdasarkan identitasnya. Secara lebih lanjut peneliti akan menjelaskan da *European Refugee Relocation Plan* yang telah ditetapkan oleh Uni terhadap Polandia. Peneliti menggunakan konsep Eropanisasi dikemukakan oleh Boerzel untuk menjelaskan respon domestik Po terhadap transfer kebijakan tersebut serta akan menjelaskan syarat mekanisme berkaitan dengan respon Polandia terhadap krisis pengun Eropa.

Poland against Islam – Manifestation in Wrocław, <https://youtu.be/o3VSKECLfqI>

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di sub-bab sebelumnya, peneliti dapat merangkum bahwa Polandia memiliki identitas sebagai berikut:

¹²⁸ Mach Zdzislaw, “Polish National Culture and its Shifting Centres”, Centre for European Studies Journal (2000): 8, [www.humanityaction.org/files/278-Polish National Culture and its Shifting Centres.pdf](http://www.humanityaction.org/files/278-Polish%20National%20Culture%20and%20its%20Shifting%20Centres.pdf).

[illegible]

diperkuat dengan argument Howel yang menekankan bahwa kebijakan luar negeri, yang didefinisikan secara luas adalah pusat dari rasa identitas nasional seseorang, dan untuk memahami tujuan, peran dan nilai bangsa mereka.¹³⁶

Sebagaimana kita tahu diberlakukannya *European Refugee Relocation Plan* tentunya mempengaruhi domestik negara anggota. Hal tersebut merupakan proses *Europeanization* dimana kebijakan suatu negara harus tunduk pada kebijakan Uni Eropa.¹⁴³ Dampak Eropanisasi terhadap kondisi domestik suatu negara berbeda-beda tergantung sebesar apa ketidak sesuaian antara Uni Eropa dan negara anggota.¹⁴⁴ Berdasarkan penjelasan peneliti sebelumnya, dapat diketahui bahwa terdapat

¹⁴⁴ Tanja A. Borzel dan Thomas Risse, "Conceptualizing the Domestic Impact of Europe," dalam *The Politics of Europeanisation*, ed. Keith Featherstone et al. (Oxford: Oxford University Press, 2003), 63.

Sebagaimana teori konstruktivisme menekankan *inter-subjective meanings* dan penekanan pada pentingnya norma-norma signifikansi para agen. Oleh karena itu, Peneliti menggunakan teori sekritisasi guna melihat bagaimana dampak domestik dari *European Refugee Relocation Plan* melalui perdebatan dan *framing* yang dilakukan oleh para agen tentang pengungsi tersebut. *Collective understandings* dan *intersubjective meanings* ini lah yang akan mempengaruhi cara aktor mendefinisikan tujuannya serta menentukan manakah aksi yang rasional dan tidak.

Jika dilihat dari berbagai macam media dan rekaman wawancara, Pemerintah Polandia cenderung menolak arahan Uni Eropa dengan mem-

[illegible]

Sekuritisasi dalam respons Polandia terhadap krisis pengungsi di Eropa

[illegible]

Jika digolongkan terhadap tingkat perubahan domestik yang dikemukakan oleh Boerzel maka tekanan adaptasi yang tinggi dan ketiadaan *facilitating factors* menjadi penjas penyebab munculnya stagnasi Polandia dalam mengimplementasikan *European Refugee Relocation Plan* yang membuatnya inkonsisten dalam merespon krisis pengungsi di Eropa.

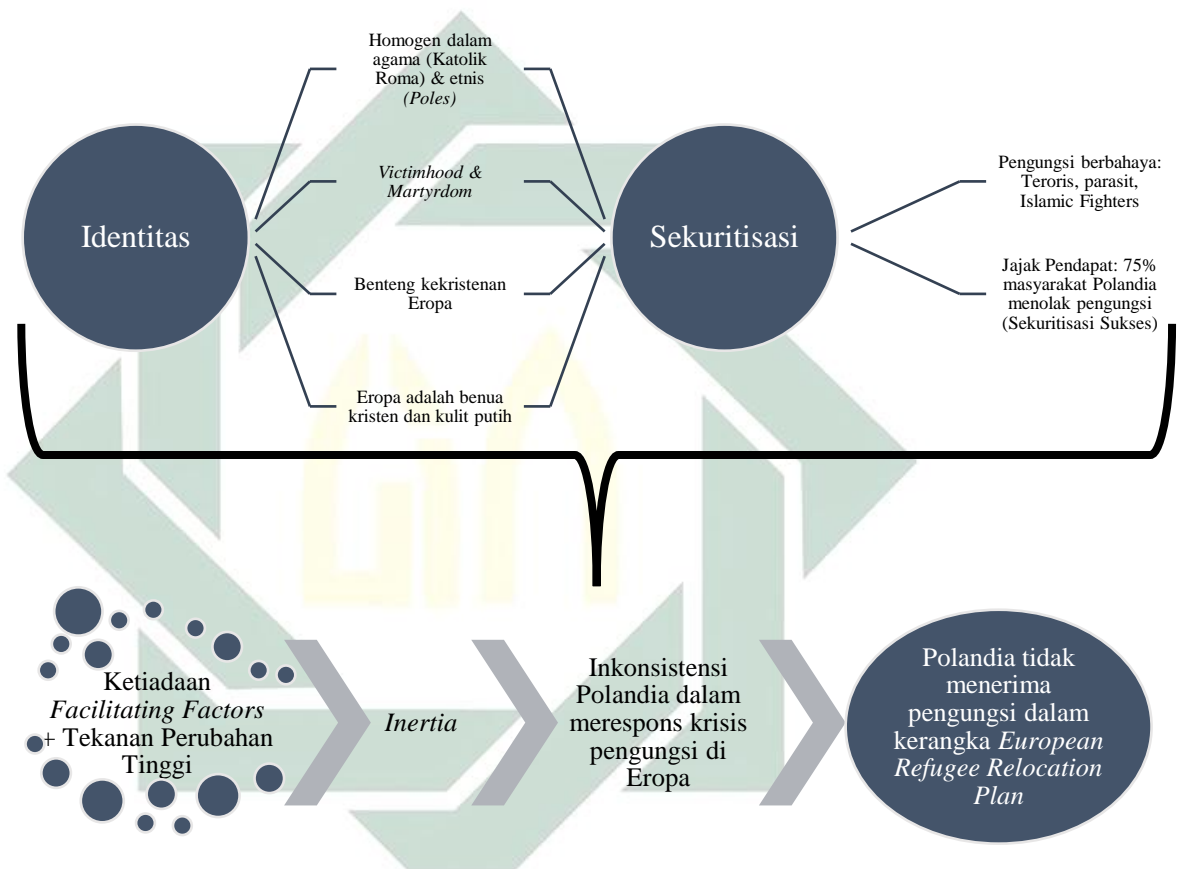
[illegible]

isu krisis ini oleh Pemerintah Polandia dan elit politik Partai PiS sebagai aktor negara dan aktor sekuritisasi utama yang kemudian diikuti oleh aktor-aktor non negara seperti masyarakat Polandia hingga badan jajak pendapat seperti CBOS yang mengeluarkan hasil survey mereka yang menunjukkan adanya pergeseran persepsi masyarakat terhadap pengungsi yakni sebesar 75% masyarakat Polandia menolak untuk menerima pengungsi.

Pergeseran persepsi tersebut menunjukkan kesuksesan *securitizing actor* dalam mensekuritisasi isu ini. Dalam tekanan perubahan yang tinggi, hal itu menyebabkan tidak adanya *facilitating factor* yang berusaha melakukan perubahan domestik politik Polandia terkait krisis pengungsi ini sehingga menyebabkan inkonsistensi Polandia yang ditunjukkan dengan stagnasi Polandia untuk tidak mengimplementasi kebijakan *European refugee relocation plan*.

Secara ringkas hasil analisis data tersebut dapat dijelaskan melalui bagan berikut:

Bagan 4.1
Analisis Data



KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penyajian dan analisis data dalam bab IV dapat disimpulkan bahwa terdapat dua alasan besar dibalik inkonsistensi Polandia terhadap krisis pengungsi di Eropa. Pertama, perbedaan identitas yang terkonstruksi antara masyarakat Polandia dengan pengungsi. Kedua, kesuksesan proses sekuritisasi isu pengungsi yang menyebabkan ketiadaan *facilitizing factors* untuk mendorong terjadinya perubahan domestik. Secara sistematis, pembahasan pada bab IV mengkonfirmasi adanya konstruksi perbedaan identitas antara pengungsi dan masyarakat Polandia. Dari identitas yang terkonstruksi itu pula yang menyebabkan stagnasi Polandia dalam mengimplementasikan *European Refugee Relocation Plan* sebagai bentuk inkonsistensi Polandia dalam merespons krisis pengungsi di Eropa.

Identitas yang dimiliki Polandia tersebut kemudian dapat dikategorikan menjadi tiga diantaranya adalah: 1) Polandia mengkonstruksi dirinya sebagai pelindung Eropa, baik secara umum maupun dari segi agama; 2) Polandia memiliki identitas yang homogen baik secara etnis (Poles) dan agama (Katolik Roma); 3) Polandia memiliki norma dan nilai yang tidak sepenuhnya sama dengan norma dan nilai yang dianut oleh Uni Eropa.

Identitas tersebut kemudian digunakan sebagai “bahan mentah” para agen dalam hal ini adalah elit politik di Polandia yang mensekritisasi isu krisis

Oleh sebab itu, sejak tahun 2015 diberlakukannya *European Refugee Relocation Plan* sebagai pengganti *Dublin Regulation* hingga 2017 Polandia belum sama sekali melakukan relokasi pengungsi dari Yunani maupun Italia ke negaranya.

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan menambah khazanah keilmuan, memperluas pemahaman, menambah wawasan, dan memberikan masukan dalam hal kerjasama keamanan maritim. Hasil Pengetahuan ini juga dapat dijadikan referensi umumnya bagi mahasiswa yang melakukan penelitian berkaitan dengan penelitian ini khususnya bagi mahasiswa program studi Ilmu Hubungan Internasional dan dapat digunakan sebagai pedoman pustaka lebih lanjut.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi kebijakan atau penelitian terkait pengungsi di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa Indonesia sering dijadikan sebagai tempat persinggahan oleh para pengungsi

Peneliti secara sadar sangat menyadari kekurangan penelitian yang telah disusun, dari awal penulisan skripsi hingga peneliti mendapatkan hasil dari apa yang telah diteliti. Peneliti menyarankan apabila dilakukan penelitian lanjutan sebaiknya diberikan tambahan informasi atau data yang lebih banyak, penelitian sebaiknya melengkapinya dengan metode wawancara, menggunakan jumlah sampel penelitian yang lebih banyak dan lokasi pekerjaan yang lebih luas sehingga data yang didapat pun dapat lebih bervariasi.

- Janon, Maria. "Poland between The West and East." 2014: 14-21.
- Kaminski, Lukasz, dan Maciej Korkuc. *A Guide to The History of Poland*. krakow: instytut pamieci narodowej, 2016.
- Karasinska, Maria. "Effects of Accession on Poland." Dalam *Enlarging The European Union*, disunting oleh Graham Avery, 29-30. Brussels: Trans European Policy Studies Association, 2009.
- King, Gary , dan Christopher J.L Murray. "Rethinking Human Security." *Political Science Quarterly*, 2001-2002.
- Krasnodebska, Moly. "Europeanization of Poland's Strategic Culture: Managing The 2013/14 Ukraine Crisis." *University of Cambridge*, t.thn.
- Ladrech, R. "Europeanization of Domestic Politics and Institutions: The Case of France." *Journal of Common Market Studies*, 1994: 69-88.
- Mach, Zdzislaw. "Polish National Culture and its Shifting Centres." 2000: 1-16.
- Mas'oed, Mochtar. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES, 1990.
- Oliva, Jose Angel Risco. "Regional Powers and Europeanization Processs in Spain ." 2006: 1-26.
- Olsen, Johan P. "Europeanization and Nation-State Dynamics." Dalam *The Future of The Nations*, ed. Sverker Gustavsson, disunting oleh Sverker Gustavsson, 272. New York: Routledge, 2004.
- Onuf, Nicholas Greenwood. *Making Sense, Making Worlds*. New York: Routledge, 2013.
- Onuf, Nicholas. *World of Our Making: Rules and Rule in Social Theory and International Relations*. Columbia: University of South Carolina Press, 1989.
- Paris, Roland. "Human Security: Paradigm Shift or Hot Air?" *International Security*, 2001: 89-429.
- Radaelli, Claudio M. "Whither Europeanization? Concept Stretching and Substantive Change",." *European Integration online Papers*, 2000.
- Roguska, Beata. "Polish Public Opinion: Attitude to Islam and Muslim." Trans. Michal Wenzel (Warszawa: CBOS, 2015).
- Sabic, Senada Selo. *The Relocation of Refugees in The European Union*. Zagreb: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2017.
- Stone, Marianne. "Security According to Buzan: A Comprehensive Security Analysis." *Security Discussion Paper Series 1*.

Wendt, Alexander. "Constructing International Politics." *International Security*, 1995: 71-81.

BBC. "EU to Sue Poland, Hungary and Czechs For Refusing Refugee Quotas." Perubahan terakhir 11 April 2018. <http://www.bbc.com/news/world-europe-42270239>.

Culture PL. "Learn The History of Poland in 10 Minutes." Perubahan terakhir 8 Juli 2018. <https://culture.pl/en/article/learn-the-history-of-poland-in-10-minutes>.

European Union. "EU Member Countries in Brief." Perubahan terakhir 4 April 2018. https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries_en.

European Union. "The EU in Brief." Perubahan terakhir 2 April 2018.
https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_en.

Foreign Policy. "The Arab Spring's Looming Refugee Crisis." Perubahan terakhir 26 Juni 2018. <http://foreignpolicy.com/2011/06/23/the-arab-springs-looming-refugee-crisis>.

Global Policy Journal. "Strategic Culture and Pragmatic National Interest."
Perubahan terakhir 5 April 2018.
<https://www.globalpolicyjournal.com/blog/22/07/2015/strategic-culture-and-pragmatic-national-interest>.

- IB Times. "European Refugee Crisis 2015: Why So Many People Are Fleeing The Middle East And North Africa." Perubahan terakhir 9 April 2018. <http://www.ibtimes.com/european-refugee-crisis-2015-why-so-many-people-are-fleeing-middle-east-north-africa-2081454>.
- Independent. "EU Plan to Relocate 160,000 Refugees From Italy and Greece by September Failing Despite Record Deaths at Sea." Perubahan terakhir 4 April 2018. <https://www.independent.co.uk/news/world/europe/eu-refugee-quotas-160000-italy-greece-failing-european-commissioner-legal-cases-obligations-a7739396.html>.
- Ministerio de Politica Territorial y Funcion Publica. "Sectorial Conferences." Perubahan terakhir 6 Juli 2018. http://www.seat.mpr.gob.es/en/portal/areas/politica_autonomica/coop_autonomica/Conf_Sectoriales.html.
- Oxford University. "Polskosc: The Legacy of Polish Past in its Present Identity Struggles." Perubahan terakhir 7 Juli 2018. <https://www.law.ox.ac.uk/research-subject-groups/centre-criminology/centreborder-criminologies/blog/2018/02/polskosc-legacy>.
- Pew Global. "Europeans not convinced growing diversity is a good thing, divided on what determines national identity." Perubahan terakhir 8 Juli 2018. <http://www.pewglobal.org/2016/07/11/europeans-not-convinced-growing-diversity-is-a-good-thing-divided-on-what-determines-national-identity/>
- Pilat, Anna, dan Dominika Potkanska. *Local Responses to The Refugee Crisis in Poland*. Warsaw: Institute of Public Affairs, 2017.
- Politico. "Migrants Carry 'Parasites and Protozoa,' Warns Polish Opposition Leader." Perubahan terakhir 8 Juli 2018. <https://www.politico.eu/article/migrants-asylum-poland-kaczynski-election/>.
- Politico. "Why Poland Doesn't Want Refugees." Perubahan terakhir 8 April 2018 <https://www.politico.eu/article/politics-nationalism-and-religion-explain-why-poland-doesnt-want-refugees/>.
- The Balance. "The European Union, How It Works, and Its History." Perubahan terakhir 4 April 2018. <https://www.thebalance.com/what-is-the-european-union-how-it-works-and-history-3306356>.
- UNHCR. "Syria Emergency." Perubahan terakhir 9 April 2018. <http://www.unhcr.org/syria-emergency.html>.
- UN Refugees. "What is A Refugee?" Perubahan terakhir 4 April 2018. <https://www.unrefugees.org/refugee-facts/what-is-a-refugee/>
- Voxeurop. "Poland, History, and Regugee Crisis: Warsaw's response calls for a sobering look to the past." Perubahan terakhir 8 Juli 2018. <https://voxeurop.eu/en/2017/poland-and-refugee-crisis-5121327>